



EKONOMI MAKRO LANJUTAN

Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U

BAGIAN 1

- ❑ Ruang lingkup dan Tujuan Masalah
- ❑ Ukuran Kinerja Ekonomi Makro

RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO

- EKONOMI MAKRO

BAGIAN DARI ILMU EKONOMI YANG KHUSUS
MEMPELAJARI MEKANISME BEKERJANYA
PEREKONOMIAN SECARA KESELURUHAN.

PENENTUAN KEGIATAN EKONOMI

- TERDAPAT 4 PENGELUARAN ATAU PERMINTAAN AGREGAT:
 1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
 2. INVESTASI PERUSAHAAN
 3. PENGELUARAN KONSUMSI & INVESTASI PEMERINTAH
 4. KEGIATAN EKSPOR

TUJUAN EKONOMI MAKRO

1. MENSTABILKAN KEGIATAN EKONOMI
2. MENCAPAI TINGKAT PENGGUNAAN TENAGA KERJA PENUH TANPA INFLASI
3. MENCiptakan PERTUMBUHAN EKONOMI YANG KUAT
4. MENGHINDARI MASALAH INFLASI

Masalah Ekonomi Makro

Pertumbuhan
Ekonomi

Pengangguran

Inflasi

Neraca
Pembayaran

PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

- MASALAH PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI ADALAH PERKEMBANGAN KEGIATAN DALAM PEREKONOMIAN YANG MENYEBABKAN BARANG DAN JASA YANG DIPRODUKSIKAN DALAM MASYRAKAT BERTAMBAH DAN KEMAKMURAN MENINGKAT

PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

- MASALAH PENGANGGURAN

PENGANGGURAN ADALAH SUATU KEADAAN SEORANG YANG TERGOLONG DALAM ANGKATAN KERJA INGIN MENDAPATKAN PEKERJAAN TETAPI BELUM DAPAT MEMPEROLEHNYA.

PENYEBAB PENGANGGURAN

1. KEKURANGAN PENGELUARAN AGREGAT
2. KARENA INGIN MENCARI PEKERJAAN YANG LEBIH BAIK
3. PERUSAHAAN MENGGUNAKAN PERALATAN PRODUKSI YANG MODERN SEHINGGA MENGURANGI PENGGUNAAN TENAGA KERJA
4. KETIDAKSESUAIAN DI ANTARA KETERAMPILAN PEKERJA DENGAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN INDUSTRI

PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

- MASALAH INFLASI

INFLASI ADALAH SUATU PROSES KENAIKAN HARGA-HARGA YANG BERLAKU DALAM PEREKONOMIAN

PENYEBAB INFLASI

1. TINGKAT PENGELUARAN AGREGAT YANG MELEBIHI KEMAMPUAN PERUSAHAAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG DAN JASA
2. PEKERJA DI BERBAGAI KEGIATAN EKONOMI MENUNTUT KENAIKAN UPAH
3. KENAIKAN HARGA BARANG IMPOR
4. PENAMBAHAN PENAWARAN UANG YANG BERLEBIHAN TANPA DIIKUTI OLEH PERTAMBAHAN PRODUKSI DAN PENAWARAN BARANG
5. KEKACAUAN POLITIK DAN EKONOMI

PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

- MASALAH NERACA PEMBAYARAN
NERACA PEMBAYARAN
- RINGKASAN PEMBUKUAN YANG MENUNJUKKAN ALIRAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN DARI NEGARA-NEGARA LAIN KE DALAM NEGERI, DAN DARI DALAM NEGERI KE NEGARA-NEGARA LAIN

CAKUPAN NERACA PEMBAYARAN

- PENERIMAAN DARI EKSPOR DAN PEMBAYARAN UNTUK IMPOR BARANG DAN JASA
- ALIRAN MASUK PENANAMAN MODAL ASING DAN PEMBAYARAN PENANAMAN MODAL KE LUAR NEGERI
- ALIRAN KE LUAR & ALIRAN MASUK MODAL JANGKA PENDEK

2 BAGIAN NERACA PEMBAYARAN

1. NERACA PERDAGANGAN

MENUNJUKKAN PERIMBANGAN DI ANTARA
EKSPOR DAN IMPOR

2. NERACA KESELURUHAN

MENUNJUKKAN PERIMBANGAN DI ANTARA
KESELURUHAN ALIRAN PEMBAYARAN KE LUAR
NEGERI DAN KESELURUHAN ALIRAN
PENERIMAAN DARI LUAR NEGERI

ALAT UKUR PRESTASI KEGIATAN EKONOMI



BAGIAN 2

- ❑ Variabel Utama Ekonomi Makro
- ❑ Kebijakan Ekonomi Makro
- ❑ Bentuk Pasar

VARIABEL UTAMA MAKRO EKONOMI

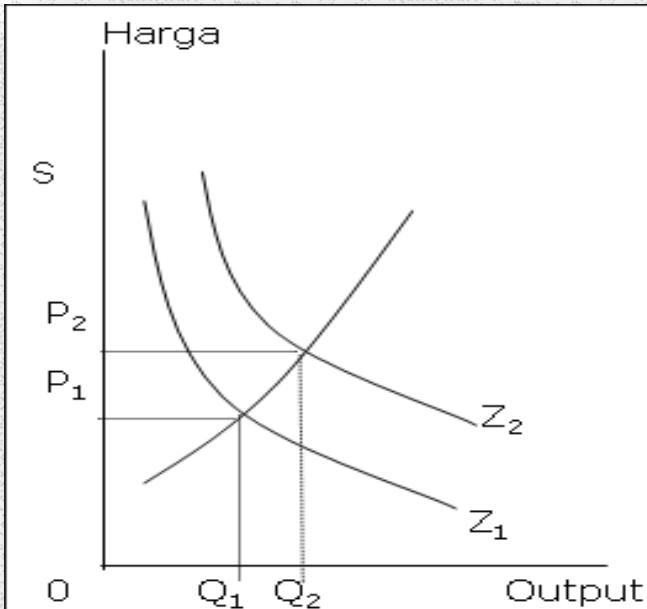
A. TINGKAT HARGA DAN LAJU INFLASI

- ❑ Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum.
- ❑ Laju inflasi adalah tingkat perubahan tingkat harga umum
- ❑ Lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan tingkat harga umum

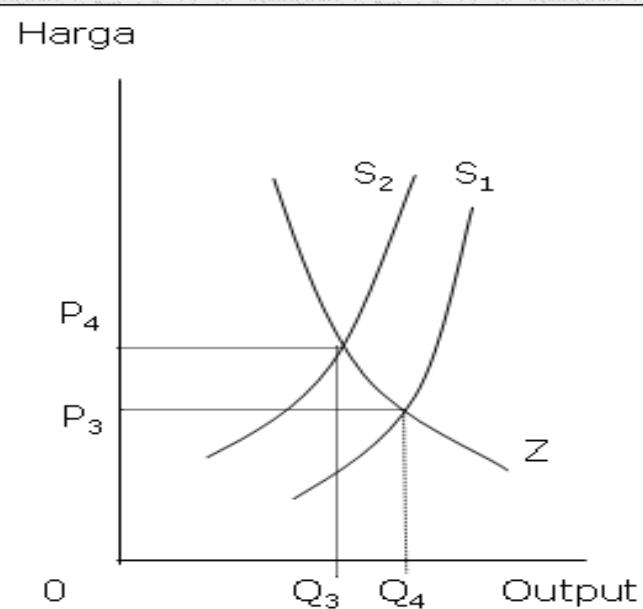
$$\text{Laju inflasi (tahun } t) = \frac{\text{Tingkat harga (tahun } t) - \text{tingkat harga (tahun } t-1)}{\text{Tingkat harga (tahun } t-1)} \times 100\%$$

- ❑ Mengapa Inflasi menjadi masalah ?
 - ❑ Inflasi berkaitan dengan daya beli
- ❑ Berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi :
 - ❑ Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*.
 - ❑ Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Ini disebut *cost inflation*.

INFLASI DALAM PENDEKATAN GRAFIK



Gb. 5.1. Demand Inflation



Gb. 5.2. Cost Inflation

LEBIH LANJUT TENTANG INFLASI TARIKAN DEMAND

1. Peningkatan Kuantitas uang



Jumlah uang beredar dan ekspektasi terhadap kenaikan harga-harga

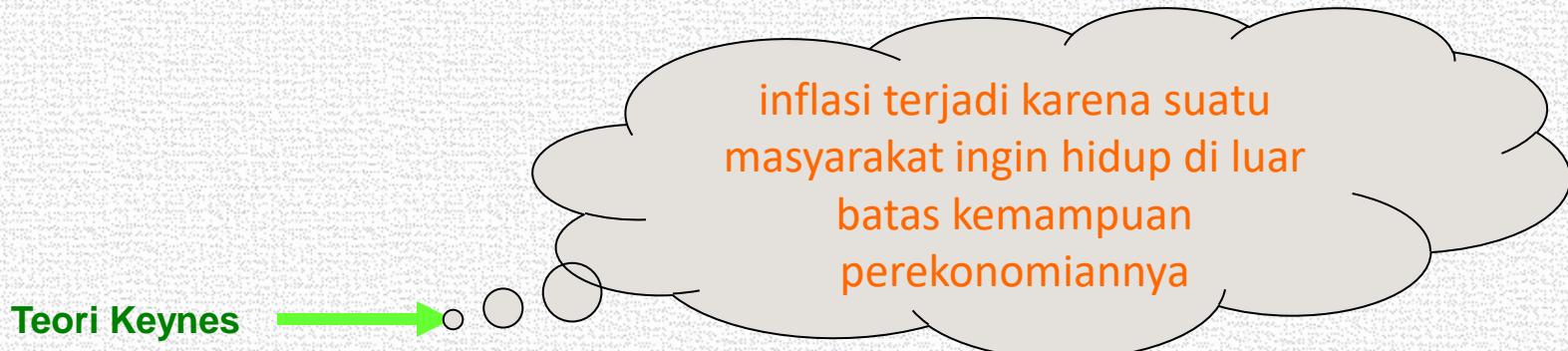
2. Kemungkinan muncul kondisi berikut :



- A. Masyarakat belum merespon kenaikan jml uang beredar. Penambahan jumlah uang beredar → penambahan uang untuk pos kas
- B. Masyarakat tidak lagi untuk menambah pos Kas-nya, tetapi untuk membeli barang (memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca)
- C. Inflasi telah terjadi lebih parah (hiperinflasi), masyarakat tidak lagi percaya pada mata uang yang dimilikinya. masyarakat cenderung langsung membelanjakannya

PANDANGAN KEYNES TENTANG INFLASI:

General Theory of employment, interest and money



Keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan *inflationary gap* (celah inflasi).

B. KESEMPATAN KERJA (EMPLOYMENT)

1. Unemployment Rate (U) :

$$U = (\sum \text{AKP} / \sum \text{AK}) \times 100\%$$

AKP = Angkatan kerja yang menganggur

AK = Total angkatan kerja

2. Jenis pengangguran :

- a. Pengangguran friksional → pengangguran karena keluar masuknya tenaga kerja dalam perekonomian
- b. Pengangguran struktural → pengangguran karena perubahan struktur ekonomi
- c. Pengangguran defisiensi permintaan → pekerjaan yang ada lebih sedikit dibanding yang menganggur
- d. Pengangguran alamiah → pengangguran saat perekonomian berada dalam keadaan full employment

3. Pengangguran menyebabkan pemborosan ekonomi

C. PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu

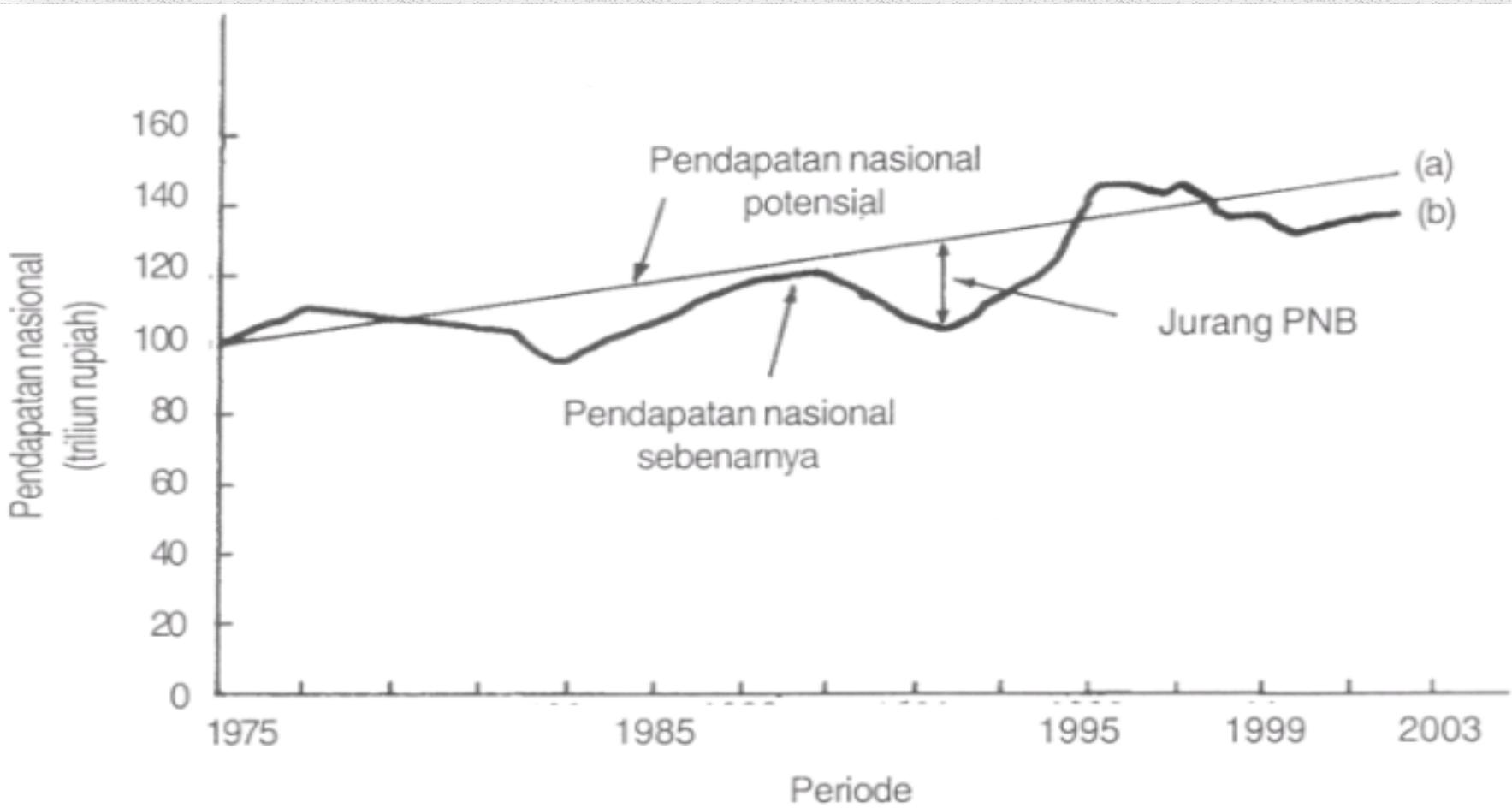
Pendapatan nasional selanjutnya dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product, GNP*), yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu
2. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product, GDP*), yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tertentu

Pendapatan nasional potensial dan sebenarnya

- Pendapatan nasional *potensial* adalah pendapatan nasional yang dapat dicapai suatu negara pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh.
- Pendapatan nasional *sebenarnya* adalah pendapatan nasional yang dapat dicapai suatu perekonomian pada kondisi aktual yang ada.

Grafik pendapatan nasional potensial dan aktual



Pendapatan Nasional Potensial dan Pendapatan Nasional Sebenarnya

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung mendasarkan pada informasi tentang tingkat pendapatan nasional riil dari tahun ke tahun, dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$g = \frac{\text{Pendapatan Nasional Riil}_{(t)} - \text{Pendapatan Nasional Riil}_{(t-1)}}{\text{Pendapatan Nasional Riil}_{(t-1)}} \times 100$$

Dimana: g = pertumbuhan ekonomi (persen)

Pendapatan nasional riil dapat dihitung dengan mendeflasikan dengan GNP- Deflator atau indeks harga (IHt). Formula yang dapat digunakan adalah :

$$\text{GNP Riil } t+1 = (100/ \text{IHt}) \times \text{GNP t+1}$$

UNTUK MENENTUKAN TINGKAT DAN PERTAMBAHAN KEMAKMURAN PENDUDUK PERLU DIHITUNG PENDAPATAN PER KAPITA PER TAHUN.

1. Pendapatan per Kapita (t) = $(GNPt / \text{Jml Penduduk t}) = X$
2. Pendapatan per Kapita (t+1) = $(GNPt+1 / \text{Jml Penduduk t+1}) = Y$
3. Pertambahan Pendapatan Per Kapita (t+1) = $((Y - X) / X) \times 100\%$

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

1. KEBIJAKAN FISKAL

MELIPUTI LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH MEMBUAT PERUBAHAN DALAM BIDANG PERPAJAKAN DAN PENGELOUARAN PEMERINTAH DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI PENGELOUARAN AGREGAT DALAM PEREKONOMIAN

KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI

Kebijakan FISKAL yaitu :

- Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian
- Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) dan transfer pemerintah (*goverment transfer*)

- Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.
- Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada pendapatan nasional

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

2. KEBIJAKAN MONETER

MELIPUTI LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MEMPENGARUHI (MERUBAH) PENAWARAN UANG DALAM PEREKONOMIAN, ATAU MERUBAH TINGKAT BUNGA, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI PENGELOUARAN AGREGAT

KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI

Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua, yaitu :

- ❑ Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian.
- ❑ Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

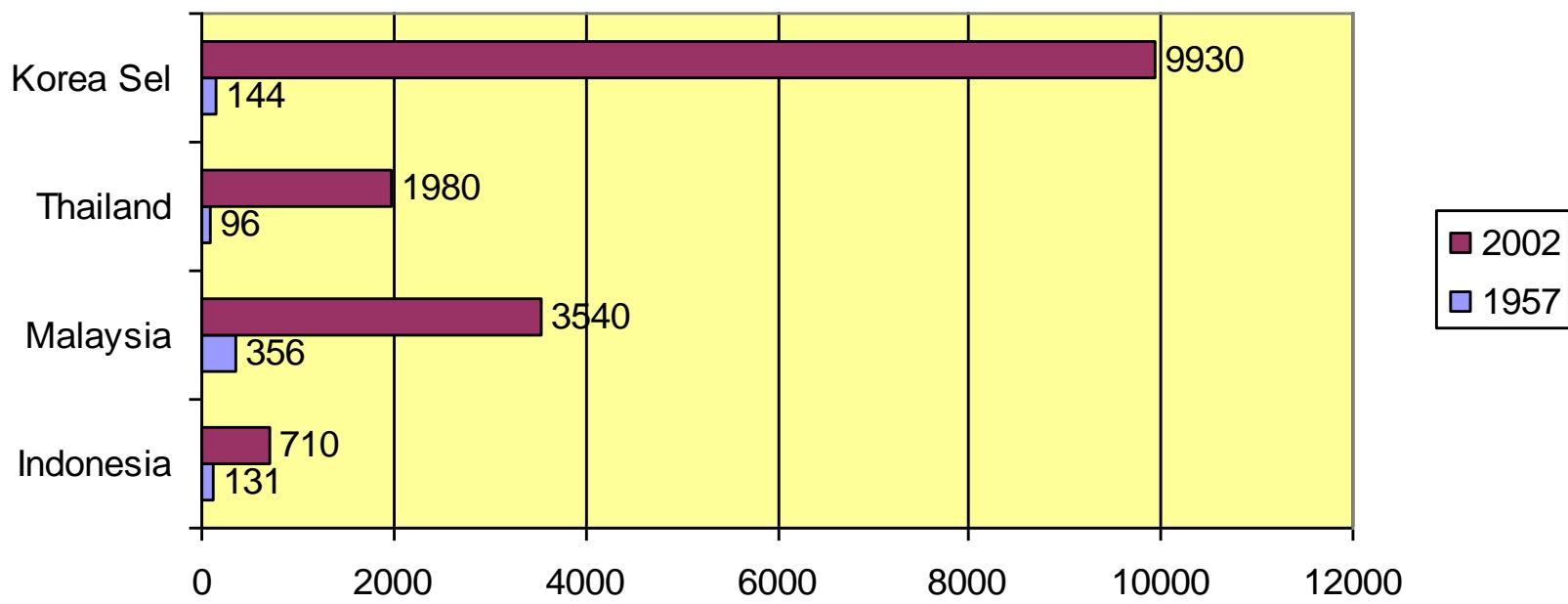
3. KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN

BERTUJUAN UNTUK MEMPERTINGGI EFISIENSI KEGIATAN PERUSAHAAN SEHINGGA DAPAT MENAWARKAN BARANG DENGAN HARGA MURAH DAN KUALITAS YANG LEBIH BAIK

PENDAPATAN PER KAPITA BEBERAPA NEGARA



Pendapatan per Kapita (US \$)



BENTUK PASAR SECARA MAKRO



PASAR BARANG

- SUATU PASAR YANG MENUNJUKKAN PERMINTAAN MASYARAKAT TERHADAP BARANG DAN JASA DENGAN BARANG DAN JASA YANG DIPRODUKSIKAN

PASAR UANG

- SUATU PASAR YANG MENUNJUKKAN PERMINTAAN MASYARAKAT TERHADAP UANG DENGAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR

PASAR TENAGA KERJA

- SUATU PASAR YANG MENUJUKKAN PERMINTAAN TERHADAP TENAGA KERJA DARI DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH DENGAN JUMLAH ANGKATAN KERJA YANG TERSEDIA

PASAR LUAR NEGERI

- SUATU PASAR YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SUATU NEGERA DALAM MENGEKSPOR BARANG DAN JASA KE LUAR NEGERI DAN MENGIMPOR BARANG DAN JASA DARI LUAR NEGERI

BAGIAN 3

- Uang
- Sistem Perekonomian Indonesia

ARTI & FUNGSI UANG

Uang

Alat pembayaran yang sah dan menjadi standar nilai dari barang dan jasa

Jenis Uang

1. Uang Kartal

Alat pembayaran yang sah dan mendapat perlindungan hukum suatu negara

2. Uang Giral

Alat pembayaran yang sah dan menjadi pengganti uang kartal, tetapi tidak dilindungi oleh hukum (misal: cek, giro, dollar AS di Indonesia)

Nilai Uang Kartal

1. Nilai Nominal

Nilai (angka) yang tercantum dalam uang tersebut

2. Nilai Intrinsik

Harga dari bahan baku uang tersebut

3. Nilai kurs

Perbandingan harga antara uang kartal suatu negara dengan uang kartal negara lain

4. Nilai Tukar

Banyaknya barang/jasa yang diperoleh dengan satu kesatuan uang

Perubahan Nilai Uang

1. Sanering

Mengubah nilai nominal uang tersebut dengan jalan pemotongan nilai uang (Rp. 10.000,00 menjadi Rp 1.000,00)

2. Revaluasi

Menurunkan nilai kurs dalam money changer (1\$ = Rp 8.000 diturunkan menjadi 1\$ = Rp 9.900,00)

3. Deflasi

Naiknya nilai tukar dari uang

4. Inflasi

Turunnya nilai tukar uang

Pengendalian Jumlah Uang Beredar

1. Kebijakan Diskonto

Kebijakan pemerintah menaikan/menurunkan suku bunga bank

2. Kebijakan Pasar Terbuka

Kebijakan pemerintah menjual/membeli surat-surat berharga

3. Kebijakan Likuiditas

Kebijakan pemerintah menaikan/menurunkan posisi prosentase likuiditas bank, yaitu batas minimum penguasaan kewajiban bank dalam bentuk uang kas atau saldo rekening koran di BI

Perekonomian Nasional

Pasal 33 UUD 1945 versi amandemen (Dasar-dasar demokrasi ekonomi Indonesia)

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yangmenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

- 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional**
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU**

KOPERASI

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

Tujuan:

- 1. Memajukan kesejahteraan anggota**
- 2. Memajukan kesejahteraan masyarakat**
- 3. Membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45**

Prinsip Koperasi

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi

1. Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Ekonomi

Mengacu pada masalah perekonomian negara terbelakang, yaitu pengembangan sumber-sumber ekonomi yg tidak/ belum digunakan walaupun penggunaannya telah cukup dikenal

Pertumbuhan Ekonomi

Mengacu pada masalah perekonomian negara maju, yaitu penggunaan sumber-sumber ekonomi yang telah dilakukan sampai batas tertentu

2. Negara kurang berkembang (*underdeveloped*)

Negara yang tidak memiliki kemampuan untuk berkembang (miskin/ *backward*)

Negara Tidak Berkembang

Negara yang tidak memiliki prospek untuk berkembang (*poor*)

Negara Sedang Berkembang

“*The Developing Countries*”, negara kurang berkembang yang sedang melakukan pembangunan

3. Ciri2 negara terbelakang

- a. Kemiskinan umum
- b. Pertanian sebagai pencarian utama
- c. Ekonomi dualistik
- d. SDA kurang terolah
- e. Pengangguran
- f. Keterbelakangan ekonomi
- g. Keterbelakangan teknologi

Hambatan Pembagunan Ekonomi

- a. Lingkaran setan kemiskinan
- b. Tingkat pembentukan modal yang rendah
- c. Aspek sosial budaya
- d. Kekuatan internasional

. Persyaratan Dasar Pembangunan Ekonomi

- a. Kemandirian
- b. Menghindari ketidaksempurnaan pasar
- c. Pembentukan modal
- d. Investasi yang tepat
- e. Perubahan sosial budaya
- f. Perbaikan administrasi pemerintahan

6. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi Modern

- a. Laju pertumbuhan penduduk seimbang dengan produk per kapita
- b. Peningkatan produktivitas
- c. Urbanisasi
- d. Ekspansi negara maju
- e. Adanya arus barang, modal dan orang antar bangsa

TERIMA KASIH

